

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Akib, Muhammad, 2016, *Politik Hukum Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bram, Deni, 2016, *Hukum Perubahan Iklim Dari Perspektif Global dan Nasional*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- G. Wibisana, Andri, 2006, *Three Principles Of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle Of Prevention, and The Precautionary Principle*, Michael G.Faure, Nicole Niessen (ed), *Environmental Law In Development: Lessons From The Indonesian Experience*, New horizons in environmental series, UK.
- Irawan, Prasetyo, 2007, *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, Jakarta.
- Istanto, F.Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- J.Cockfield, Arthur, 2011, *Optimal Climate Change Tax Policy For Small Open Economics*, Richard Cullen, Jefferson VanderWolk, Yan Xu (ed), *Green Taxation in East Asia*, Edward Elgar Publishing Limited, UK.
- Kadir, Abdul, 2014, *Kapita Selekta Perpajakan Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- L.Tanya, Bernard, 2011, *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mallongi, Anwar, 2019, *Dinamika Polutan Dan Risiko Kesehatan Lingkungan*, Gosen Publishing, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2007, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Granit, Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula dan dan Edi Slamet Irianto, 2013, *Pengantar Ilmu Pajak Dalam Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Santoso, Aris Prio Agus, Yoga Dewa Brahma, dan Rina Arum Prastyanti, 2021, *Hukum Dan Politik Serta Pengaruh Dan Peranan Politik Hukum Bagi Negara*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala, 2010, *Hukum Pajak Elementer Dalam Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siauw Jan, Tjia, 2013, *Pengadilan Pajak: Upaya Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Wajib Pajak*, PT.Alumni, Bandung.
- Smith, Adam, 1776, “The Wealth Of Nations”, Book V, Chapter 2, Part II, London.
- Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari, 2015, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wibisana, Andri.G dan Laode M.Syarif, 2015, *Hukum Lingkungan dalam Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Wibisana, Andri.G, 2006, “Three Principles Of Environmental Law: The Polluter-Pays Principle, The Principle Of Prevention, and The Precautionary Principle”, Michael G.Faure and Nicole Niessen (ed), *Environmental Law In Development: Lessons From The Indonesian Experience*, New horizons in environmental series.
- World Bank Group, 2017, “Carbon Tax Guide: A Handbook For Policy Makers”, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington, DC.

b. Artikel/Tesis/Skripsi

- Acep Rohendi, “Fungsi Budgeter dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia”, *Ecodemica*, Vol.II, No.1, April 2014.
- Albertus Wenau, “Perubahan Kebijakan Pajak Karbon Ke Skema Perdagangan Karbon Pemerintah Australia Era Tony Abbott”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman*, Vol.2, No.4, 2014.
- Amalia Yuliasih, “Dampak Politik Dan Ekonomi Penghapusan Pajak Karbon Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol.6, No.1, 2018
- Binh Tran-Nam dan Chris Evans, “The Impact of Cedric Sandford on the Discipline of Tax Compliance Costs”, *Australian Tax Forum*, Vol.17, No.4, 2002.
- Dahliana Hasan dan Dinarjati Eka Puspitasari, “Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.20, No.3, Oktober 2008.
- Dhaniswara K.Harjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum Universitas Kristen Indonesia*, Vol.6, No.2, Agustus 2020.
- Dian Fitriana, *Menghadapi Tantangan Proposal Pajak Karbon di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, 2015.
- Hasan Rachmany, “A Study Of Possible Imposition Of Carbon Taxes In Indonesia”, *Jurnal Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia*, Vol.1, No.1, Maret 2020.
- Lawrence Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana dan Decmonth Nuel Pasaribu, “Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.5, No.1, Januari 2022.
- Mia Kusuma Fitriana, “Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.2, Juni 2015.
- Micheline Hendrito, *Kebijakan Pajak Karbon (Carbon Tax) Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

Riris Rotua Sitorus dan Tangguh Pratysto, “Pajak Karbon, Kerusakan Karbon, dan Pertumbuhan Ekonomi Di Lima Belas Negara Selama 27 Tahun”, *Jurnal Manajemen Bisnis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol.7, No.2, 2018.

Sulasi Rongiyati, “Politik Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Vol.13, No.20, Oktober 2021.

Yustinus Prastowo, “Kerangka Filosofis Bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak”, *Majalah Pajak*, XVI, 2015.

William McCleary, “The Earmarking Of Government Revenue, A Review of Some World Bank Experience”, *The World Bank Research Observer*, Vol.6, Issue 1, Januari 1991.

c. Internet

Agung Wardana, “Omnibus Law Cipta Kerja: Peneguhan Hukum sebagai Instrumen Akumulasi Kapital”, <https://indoprogress.com/2020/10/omnibus-law-cipta-kerja-peneguhan-hukum-sebagai-instrumen-akumulasi-kapital/>, 8 Oktober 2020.

Anisatul Umah, “Ini Penjelasan Batasan Emisi Karbon di PLTU Buat Pajak Karbon”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211201125954-4-295792/ini-penjelasan-batasan-emisi-karbon-di-pltu-buat-pajak-karbon>, 11 Desember 2022.

Antara, “Pengusaha Tolak Penerapan Pajak Lingkungan”, <https://www.antaraneews.com/berita/33573/pengusaha-tolak-penerapan-pajak-lingkungan?msclkid=bde153f9d03211ec95df8290ef681a2b>, 27 April 2022.

DDTCNews, “Simak, Ini Skema Pengenaan Pajak Karbon dalam UU HPP”, <https://news.ddtc.co.id/simak-ini-skema-pengenaan-pajak-karbon-dalam-uu-hpp-33577>, 27 Mei 2022.

DDTCNews, “Implementasi Pajak Karbon Ditunda, Sri Mulyani Beri Penjelasan”, <https://news.ddtc.co.id/implementasi-pajak-karbon-ditunda-sri-mulyani-beri-penjelasan-37998>, 28 Mei 2022.

- DPR RI, “Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Memadai”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35123/t/Implementasi+Pajak+Karbon+Harus+Disertai+Peta+Jalan+Memadai>, 29 Juli 2022.
- Gloria Setyvani Putri, “Laporan PBB: Pemanasan Global Tak Terkendali Karena Ulah Manusia”, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/24/150000623/laporan-pbb--pemanasan-global-tak-terkendali-karena-ulah-manusia-?page=all>, 09 Februari 2021.
- Hukum Online, “Pemerintah Ngotot Pajak Lingkungan Masuk RUU Pajak dan Retribusi Daerah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-ngotot-pajak-lingkungan-masuk--hol14900?page=4>, 23 Maret 2022.
- IDN Times, “PBB Akui Lingkungan Bersih adalah Hak Asasi Manusia”, <https://www.idntimes.com/news/world/pri-145/pbb-akui-lingkungan-bersih-adalah-hak-asasi-manusia-c1c2/3>, 09 Juni 2022.
- Kompas, “Pengusaha Tolak Rencana Implementasi Pajak Karbon”, <https://money.kompas.com/read/2021/08/24/195403626/pengusaha-tolak-rencana-implementasi-pajak-karbon?page=all>, 28 Mei 2022.
- Kompas, “RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Selangkah Lagi Disahkan DPR”, <https://money.kompas.com/read/2021/09/30/175037226/ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan-selangkah-lagi-disahkan-dpr>, 29 Juli 2022.
- Kompasiana, “Porsi APBN Untuk Mengatasi Krisis Iklim Hanya 4,1%, Bagaimana Solusinya?”, <https://www.kompasiana.com/dhitamutiaranabella7724/60c60fa3d541df47665504f2/porsi-apbn-untuk-mengatasi-krisis-iklim-hanya-4-1-bagaimana-solusinya?page=all#sectionall>, 14 Juli 2022.
- Kontan, “Kementerian ESDM lakukan uji coba perdagangan karbon dengan 80 unit PLTU Batubara”, <https://industri.kontan.co.id/news/kementerian-esdm-lakukan-uji-coba-perdagangan-karbon-dengan-80-unit-pltu-batubara>, diakses pada 12 Agustus 2022.
- Martha Maulidia, “Carbon Tax For Indonesia: Time to act now”, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/04/29/carbon-tax-indonesia-time-act-now.html>, 25 Juli 2022.
- Materi Paparan Ferike Indah Arika perwakilan Badan Kebijakan Fiskal dalam Acara Webinar Bertajuk, “Percepatan Pengembangan Ekonomi Karbon

di Indonesia”, diakses melalui Kanal Youtube Kementerian LHK, 08 Agustus 2022.

Materi Paparan Wahyu Marjaka perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Acara Webinar Bertajuk, “Percepatan Pengembangan Ekonomi Karbon di Indonesia”, diakses melalui Kanal Youtube Kementerian LHK, 08 Agustus 2022.

Materi Paparan Irine Handika Ikasari dalam acara Afternoon Tax talk FH UGM, diakses melalui kanal youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, 08 Agustus 2022.

Materi Paparan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, “Pajak Karbon di Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”, dalam Webinar Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Di Subsektor Ketenagalistrikan, 2 Desember 2021.

Materi Paparan Joko Tri Haryanto dalam Kuliah Umum: Indonesian Carbon Tax 101, diakses melalui Kanal Youtube SDGs Center Unpad, 10 Agustus 2022

Merdeka, “Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibanding Cukai Dalam Mengendalikan Emisi Karbon”, <https://www.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-pilih-skema-pajak-dibanding-cukai-dalam-mengendalikan-emisi-karbon.html>, 27 Juli 2022.

Michelle Natalia, “Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Butuh Dana Rp3.500 Triliun”, <https://economy.okezone.com/read/2022/07/13/320/2628794/atasi-perubahan-iklim-sri-mulyani-butuh-dana-rp3-500-triliun?page=1>, 13 Juli 2022.

Oktiani Endarwati, “Potensi Perdagangan Karbon Indonesia Capai Rp8.000 Triliun, Ini Rinciannya”, <https://www.idxchannel.com/economics/potensi-perdagangan-karbon-indonesia-capai-rp8000-triliun-ini-rinciannya>, 29 Juli 2022.

Republika, “Sri Mulyani: 34 Persen APBN Untuk Pembiayaan Perubahan Iklim”, <https://www.republika.co.id/berita/qfpmqt383/sri-mulyani-34-persen-apbn-untuk-pembiayaan-perubahan-iklim>, 14 Juli 2022.

Triyan Pangastuti, “Ketimpangan Harga, Pajak Karbon Batal Berlaku”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/910065/ketimpangan-harga-pajak-karbon-batal-berlaku/?view=all>, 25 Juni 2022.

Zubaedah Hanum, “Jalankan Ekonomi Rendah Karbon, Presiden Siapkan Perpres”, <https://mediaindonesia.com/humaniora/325907/jalankan-ekonomi-rendah-karbon-presiden-siapkan-perpres>, 8 Juli 2022.

d. Peraturan Perundang-Undangan dan Lainnya

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) Tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV.

Laporan Triwulanan I-2020 Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2021, Bank Indonesia.

Laporan Pendanaan Publik Untuk Pengendalian Perubahan Iklim Indonesia Tahun 2016-2018, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.

Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018-2020, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2020.

First Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2016.

Second National Communication, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2010.

OECD, Environmental Taxation (A Guide For Policy Makers), 2011.

OECD, *Taxing Energy Use for Sustainable Development: Opportunities for energy tax and subsidy reform in selected developing and emerging economies*, 2021.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Road Map NDC Adaptasi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2020.

Climate Transparency Report 2021, Comparing G20 Climate Action Towards Net Zero in Indonesia, IESR.